



Media Title	Kompas		
Head Line	Tarif Naik 5 oktober		
Date	20 Sep 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	19	Article Size	
Journalist	ARN	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Tarif Naik 5 Oktober

Lima Jalan Tol Tidak Capai Standar Pelayanan Minimum

JAKARTA, KOMPAS – Badan Pengawas Jalan Tol mengumumkan lima jalan tol tidak mencapai standar pelayanan minimum. Jika tidak segera dibenahi, tarif lima jalan tol itu tidak akan naik pada 5 Oktober mendatang. Tarif 17 jalan tol seharusnya naik bulan depan.

Lima jalan tol yang belum mencapai standar pelayanan minimum adalah Tol Dalam Kota ruas Cawang-Tomang-Grogol, Tol Prof Dr Sedyatmo, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Surabaya-Madura, dan Tol Kanci-Pejagan.

Menurut Kepala Badan Pengawas Jalan Tol (BPJT) Gani Ghazaly Akman, sebagian besar standar pelayanan minimum (SPM) yang tidak terpenuhi adalah penerangan jalan umum. "Misalnya di Tol Dalam Kota, lampu penerangan jalannya sudah berka-

li-kali mati. Begitu juga dengan Tol Bandara dan Tol Suramadu," kata Gani di Jakarta, Kamis (19/9).

Di Tol Jakarta-Cikampek banyak ditemukan lubang, sedangkan jalan di Tol Kanci-Pejagan tidak rata. "Tol Kanci-Pejagan ini juga tidak naik tarif dua tahun lalu. Operasinya sulit memperbaiki jalan itu karena kendaraan yang melintas juga masih sepi. Jumlahnya masih di bawah 10.000 kendaraan per hari," kata Gani.

Sementara itu, Hasanudin, Di-

rektur Operasi PT Jasa Marga, selaku operator Tol Dalam Kota, mengatakan, lampu yang sering mati hanya tiga lampu. Setelah diteliti, ternyata lampu yang menggunakan tenaga surya akan mudah rusak jika di dekat saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET). "Lampu yang mati selalu yang di bawah SUTET. Sekarang jenis lampunya sudah kami ganti. Jadi, tidak mati lagi sekarang," kata Hasanudin.

Mengenai kenaikan tarif tol, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo mengatakan, pihaknya tidak merasa keberatan sepanjang persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dipenuhi operator. Namun, Sudaryatmo mengatakan, sebaiknya kenaikan tarif tidak lagi didasarkan pada dipenuhi atau tidaknya SPM. "Kita harus merekonsepsi SPM. Jangan gunakan kata minimum ka-

rena hal itu seperti mengunci operator untuk melakukan inovasi. Penilaian terhadap operator harus memperhitungkan juga perspektif konsumen," ujarnya.

Sementara itu, Nusyirwan Sudjono, anggota Komisi V DPR, mengatakan, BPJT harus tegas terhadap pemegang konsesi jalan tol yang belum memulai pembangunan. "Jika jalan tol itu terbangun, sistem jaringan jalan akan terwujud, sehingga kemandirian bisa diurai," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Ipoeng Poernomo mengatakan, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, BPJT harus lebih diperkuat. "Target pembangunan tol sepanjang lebih dari 3.000 kilometer. Saat ini baru terwujud 747 kilometer. Jika BPJT diperbesar dan diperkuat, masyarakat memiliki sistem jaringan jalan yang lebih baik," ujarnya. (ARN)